

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI TINGKAT BAPAS SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:
AGUS EDY SAPUTRO
C100130054**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI TINGKAT BAPAS SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh :

AGUS EDY SAPUTRO
C100130054

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Hartanto, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI TINGKAT BAPAS SURAKARTA

Oleh :

AGUS EDY SAPUTRO
C100130054

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 1 November 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Hartanto, SH.M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, SH.M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan SH.M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M. Hum
NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran pada pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Desember 2019

Penulis



AGUS EDY SAPUTRO
C100130054

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI TINGKAT BAPAS SURAKARTA

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum dan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang di tingkat Bapas Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah penanganan serta perlakuan yang baik dan tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak, Maka dari itu dibutuhkan peran suatu lembaga khusus serta aparat khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu perlu diingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya merugikan anak itu sendiri melainkan juga merugikan masyarakat. Kendala dalam berkomunikasi, untuk komunikasi BAPAS memang benar-benar mengalami kesulitan terutama bagi klien yang berkomunikasi berbagai macam bahasa, seperti klien yang tempat tinggalnya didaerah, tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia, dan klien yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar maka komunikasi antara BAPAS dan klien pemasyarakatan belum dapat menyatu dikarenakan bahasa tersebut.

Kata kunci : perlindungan hukum, hak asasi, anak dibawah umur, tindak pidana narkotika

Abstract

The research aims to find out the mechanism of legal protection and human rights for minors who are perpetrators of narcotics crime based on the Act at the Bapas Surakarta level. This type of research is descriptive, which is to clearly describe the Legal Protection and Human Rights of Underage Children as Narcotics Criminals. Data analysis method used is normative-qualitative by compiling data collected including regulations, books, jurisprudence regarding Legal Protection and the Rights of Underage Children as Narcotics Actors analyzed qualitatively analyzed and then conclusions drawn. The results of this study are Handling as well as the right and proper treatment of children who commit crimes is very influential on the psychology of children. Therefore, it is needed the role of a special institution and special apparatus to deal with children who are dealing with the law both at the police, attorney, and court levels. In addition, it is important to remember that a crime committed by a child does not only harm the child itself but also harms the community. Constraints in communication, for BAPAS communication, it is really difficult, especially for clients who communicate in

various languages, such as clients who live in the region, cannot use Indonesian, and clients who cannot speak Indonesian correctly, so communication between BAPAS and clients correctional facilities can not be integrated because of the language.

Keywords: *legal protection, human rights, minors, narcotics crime*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia (makhluk ciptaan Tuhan). Berdasarkan hal tersebut maka anak juga memiliki hak asasi yang diakui oleh setiap negara dan juga merupakan landasan terhadap kemerdekaan, keadilan, perdamaian diseluruh dunia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, demikian juga terhadap anak yang masih dalam kandungan ibunya. Ketentuan mengenai anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan dikatakan seorang anak. Indikator mengenai anak dalam KUHP hanya diatur pada Pasal 45 dan Pasal 72 Ayat (1) bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun.¹

Anak memiliki peranan penting dalam kehidupan negara dan masyarakat, hal ini didasarkan bahwa anak merupakan calon pengganti atau penerus bangsa. Anak memiliki potensi untuk berperan secara aktif melestarikan kehidupan bangsa yang mana dasarnya telah diletakkan oleh pendahulunya. Sebagai penerus terhadap suatu bangsa maka anak memiliki kewajiban yang mulia serta tanggung jawab berat dengan tujuan terwujudnya tujuan negara Indonesia.²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

¹ Solahuddin, 2008, *KUHP, KUHP, KUHPdt*, Jakarta: Visimedia, hal. 16-22.

² Asep Syarifuddin Hidayat, *et.all*, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Salam: Jurnal Sosial dna Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3, hal. 308.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tahun 2018 berdasarkan data dari Polresta Surakarta terdapat 83 kasus terkait narkoba. Jumlah ini turun berbanding tahun 2017 yang berjumlah 164 kasus. Kasus narkoba di Surakarta pada Tahun 2018 banyak terjadi di wilayah Kecamatan Banjarsari berjumlah 31 kasus. Seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNNK Solo mengatakan bahwa pada saat ini peredaran narkoba pada anak-anak baik TK maupun SD.³

Penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang anak masuk kategori pelanggaran hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Restorative justice atau keadilan restoratif dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track sistem*, ini berarti sistem peradilan ini menganut 2 jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.⁴

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum dan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang di tingkat Bapas Surakarta, 2) Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur di Bapas

³ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pqgfn3423/kota-solo-targetkan-keluar-dari-zona-merah-narkoba>

⁴ Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III, April, 2015, hal., 71.

Surakarta, 3) Untuk mengetahui kendala terhadap pelayanan pembimbingan warga Bapas dalam penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba di wilayah Surakarta.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba.⁵ Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Di Tingkat Bapas Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai mekanisme perlindungan hukum dan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang di tingkat bapas surakarta bahwa penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahgunaan untuk diri sendiri, antara lain:

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

- a. Penjelasan Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Penjelasan Pasal 55 ayat :
 - 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c. Pasal 103 ayat
 - (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau Presiden Republik Indonesia.
 - 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- d. Pasal 127 ayat (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Di Bapas Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa fungsi lapas dalam memberikan bimbingan kepada anak dijalankan berdasarkan Hak dan

Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak;

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan;
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Anak

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak Pasal 4 ayat (1) dan (2). Berbunyi: (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;

- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Kendala Terhadap Pelayanan Pembimbingan Warga Bapas Dalam Penegakkan Hukum, Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Wilayah Surakarta

Kendala dalam Kuantitas BAPAS dengan jumlah lebih daripada 100 klien BAPAS yang sedang menjalankan masa bimbingan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang hanya 35 orang lebih pegawai yang bertugas sebagai pembimbing pemasyarakatan di BAPAS sedangkan jumlah klien pemasyarakatan berjumlah 100 orang lebih, sehingga dengan kekurangan tenaga ini juga dapat menjadikan kendala dalam bimbingan kerja. Dan dengan keterbatasan tenaga pembimbing Kemasyarakatan inilah membuat tidak semua klien tidak dapat dikunjungi secara langsung. Apabila beberapa para pegawai mengunjungi secara langsung, yang akan mengerjakan tugas didalam akan kekurangan anggota, sehingga keterbatasan kuantitas pegawai mengakibatkan salah satu kecenderungan tidak dapat mengunjungi secara langsung klien pemasyarakatan.⁶

Kendala Dalam Berkomunikasi, untuk komunikasi BAPAS memang benar-benar mengalami kesulitan terutama bagi klien yang berkomunikasi berbagai macam bahasa, seperti klien yang tempat tinggalnya didaerah, tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia. diakibatkan tidak mengetahui bahasa daerah lain, dan klien yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar maka komunikasi antara BAPAS dan klien pemasyarakatan belum dapat menyatu dikarenakan bahasa tersebut.⁷

Kendala dalam Luas Wilayah, sebagian klien pemasyarakatan tidak hanya berpendudukan di kota, tetapi diberbagai daerah seperti perdesaan

⁶Purnami Handayani,SH, Pembimbing Kemasayarakatan Bapas Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib.

⁷Purnami Handayani,SH, Pembimbing Kemasayarakatan Bapas Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib..

yang susah di jangkau seperti di Tangen Sragen dan sebagainya. Dimana para pihak BAPAS tidak dapat langsung terjun ke daerah diluar kota untuk memberikan bimbingan atau mengunjungi klien pemasyarakatan, karena kurangnya dana dan kurangnya kuantitas untuk dapat menjangkau daerah yang jauh dari kota Surakarta. Apabila dana mencukupi, maka BAPAS dapat menjangkau klien yang bertempat tinggal jauh dan terpencil, karena tidak didukung oleh dana, sehingga BAPAS hanya dapat menjangkau daerah yang dapat terjangkau.⁸

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mekanisme Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Di Tingkat Bapas Surakarta.

Di Indonesia sistem peradilan pidana anak menggunakan paradigma restoratif yaitu mengutamakan keadilan restoratif. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif adalah melalui upaya diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi diwajibkan mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Apabila kewajiban pengupayaan diversi sengaja tidak dilaksanakan baik oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim maka sanksi pidana akan dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi penjatuhan sanksi pidana tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012. Penanganan serta perlakuan yang baik dan tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak, Maka dari itu dibutuhkan peran suatu lembaga khusus serta aparat

⁸Purnami Handayani,SH, Pembimbing Kemasayarakatan Bapas Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib.

husus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu perlu diingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya merugikan anak itu sendiri melainkan juga merugikan masyarakat.

2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur Di Bapas Surakarta

Proses Penanganan BAPAS Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan. Proses Pembimbingan meliputi: a) Melakukan Bimbingan Kelompok; b) Melakukan Bimbingan Ketrampilan; c) Melakukan Bimbingan Perorangan; d) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.

Dalam pelaksanaan bimbingan dengan pendekatan *attending* di BAPAS Surakarta dengan cara individu. Bimbingan ditujukan untuk orang yang terjerat kasus tindak kriminal, baik anak maupun dewasa. Anak yang dibimbing di BAPAS adalah anak nakal atau anak yang melanggar hukum, diantaranya pidana bersyarat (PiB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT). Bimbingan yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Bermasalah Hukum (ABH) antara lain bimbingan kemandirian dan juga bimbingan ketrampilan. Bimbingan kemandirian diantaranya meliputi pemberian pemahaman norma-norma hukum, pemahaman agama, menanamkan peran sosial kepada Anak Bermasalah Hukum (ABH). Sedangkan bimbingan ketrampilan diberikan kepada anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah dan belum mempunyai pekerjaan. Dalam bimbingan ketrampilan biasanya disesuaikan dengan bakat yang dimiliki oleh anak, sehingga bakat anak menjadi terasah dengan baik. Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang sudah selesai menjalani bimbingan ketrampilan bisa bekerja dilapangan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang menangani Anak tersebut juga akan membantu mencari tempat untuk anak tersebut bekerja. Bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Bermasalah Hukum (ABH) dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Proses bimbingan

dilakukan selama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, bisa dilakukan di kantor Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta dan juga bisa dilakukan di rumah Klien (Anak Bermasalah Hukum).

3. Kendala Terhadap Pelayanan Pembimbingan Warga Bapas Dalam Penegakkan Hukum, Pencegahan Dan Penaggulangan Kejahatan Narkotika Di Wilayah Surakarta.

Kendala dalam Kuantitas BAPAS dengan jumlah lebih dari pada 100 klien BAPAS yang sedang menjalankan masa bimbingan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang hanya 35 orang lebih pegawai yang bertugas sebagai pembimbing pemsarakatan di BAPAS sedangkan jumlah klien pemsarakatan berjumlah 100 orang lebih, sehingga dengan kekurangan tenaga ini juga dapat menjadikan kendala dalam bimbingan kerja. Dan dengan keterbatasan tenaga pembimbing Kemasyarakatan inilah membuat tidak semua klien dapat dikunjungi secara langsung. Apabila beberapa para pegawai mengunjungi secara langsung, yang akan mengerjakan tugas didalam akan kekurangan anggota, sehingga keterbatasan kuantitas pegawai mengakibatkan salah satu kecenderungan tidak dapat mengunjungi secara langsung klien pemsarakatan.

Kendala dalam berkomunikasi, untuk komunikasi BAPAS memang benar-benar mengalami kesulitan terutama bagi klien yang berkomunikasi berbagai macam bahasa, seperti klien yang tempat tinggalnya didaerah, tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia, dan klien yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar maka komunikasi antara BAPAS dan klien pemsarakatan belum dapat menyatu dikarenakan bahasa tersebut.

Kendala dalam Luas Wilayah, sebagian klien pemsarakatan tidak hanya berpendudukan di kota, tetapi diberbagai daerah seperti perdesaan yang susah di jangkau seperti di Tangen Sragen dan sebagainya. Dimana para pihak BAPAS tidak dapat langsung terjun ke daerah diluar kota untuk memberikan bimbingan atau mengunjungi klien pemsarakatan, karena kurangnya dana dan kurangnya kuantitas untuk dapat menjangkau daerah yang jauh dari kota Surakarta. Apabila dana mencukupi, maka BAPAS dapat menjangkau klien yang bertempat tinggal jauh dan terpencil, karena

tidak didukung oleh dana, sehingga BAPAS hanya dapat menjangkau daerah yang dapat terjangkau.

4.2 Saran

1. Untuk BAPAS, diharapkan kedepannya lebih meningkatkan kinerja pelayanan yang berasal dari sistem terpadu dan juga meningkatkan sumber daya pegawai agar program dapat berjalan dengan baik
2. Untuk aparat penegak hukum, terus meningkatkan kinerja berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan.
3. Untuk BAPAS, diharapkan kedepannya bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penggunaan narkoba berupa melakukan sosialisasi dan nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

Asep Syarifuddin Hidayat, *et.all*, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Salam: Jurnal Sosial dna Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3, hal. 308.

Purnami Handayani,SH, Pembimbing Kemasayarakatan Bapas Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib.

Purnami Handayani,SH, Pembimbing Kemasayarakatan Bapas Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib..

Purnami Handayani,SH, Pembimbing Kemasayarakatan Bapas Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib.

Solahuddin, 2008, *KUHP, KUHP, KUHPdt*, Jakarta: Visimedia, hal. 16-22.

Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III, April, 2015, hal., 71.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pqgfn3423/kota-solo-targetkan-keluar-dari-zona-merah-narkotika>